



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

H. SYAMSUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



H. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



 
H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

: 99 TAHUN 2017

: 26 JANUARI 2017

: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AJANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. Wil. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
34	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
35	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
36	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
254	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 TAKALAR	SMAN 2 TAKALAR
255	UPT. Wil. Takalar	SMAN 3 TAKALAR	SMAN 3 TAKALAR
256	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 GALESONG UTARA	SMAN 4 TAKALAR
257	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 GALESONG SELATAN	SMAN 5 TAKALAR
258	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 6 TAKALAR
259	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 MANGARABOMBANG	SMAN 7 TAKALAR
260	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 POLOMBANGKENG SELATAN	SMAN 8 TAKALAR
261	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 9 TAKALAR
262	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 MAPPAKASUNGGU	SMAN 10 TAKALAR
263	UPT. Wil. Takalar	SMAN 3 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 11 TAKALAR
264	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 MAPPAKASUNGGU	SMAN 12 TAKALAR
265	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 GALESONG SELATAN	SMAN 13 TAKALAR
266	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MAKALE	SMAN 1 TANA TORAJA
267	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 2 MAKALE	SMAN 2 TANA TORAJA
268	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MENGKENDEK	SMAN 3 TANA TORAJA
269	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SANGALLA	SMAN 4 TANA TORAJA
270	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 3 MAKALE	SMAN 5 TANA TORAJA
271	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 RANTETAYO ✓	SMAN 6 TANA TORAJA ✓
272	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 BONGGAKARADENG	SMAN 7 TANA TORAJA
273	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SALUPUTTI	SMAN 8 TANA TORAJA
274	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 2 MENGKENDEK	SMAN 9 TANA TORAJA
275	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MASANDA	SMAN 10 TANA TORAJA
276	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 BITTUANG	SMAN 11 TANA TORAJA
277	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MAPPAK	SMAN 12 TANA TORAJA
278	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SIMBUANG	SMAN 13 TANA TORAJA
279	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 RANTEPAO	SMAN 1 TORAJA UTARA
280	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 2 RANTEPAO	SMAN 2 TORAJA UTARA
281	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 SESEAN	SMAN 3 TORAJA UTARA
282	UPT. Wil. Toraja Utara	SMAN 1 RINDINGALLO	SMAN 4 TORAJA UTARA
283	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 TONDON	SMAN 5 TORAJA UTARA
284	UPT. Wil. Toraja Utara	SMAN 1 KESU	SMAN 6 TORAJA UTARA
285	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 SA DAN	SMAN 7 TORAJA UTARA
286	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 BUNTU PEPASAN	SMAN 8 TORAJA UTARA
287	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 Nanggala	SMAN 9 TORAJA UTARA
288	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SENGKANG	SMAN 1 WAJO
289	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 MAJAULENG	SMAN 2 WAJO

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BANGUNAN
1	2	3	4
290	UPT. Wil. Wajo	SMAN 2 SENGKANG	SMAN 3 WAJID
291	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 MANIANGPAJO	SMAN 4 WAJID
292	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 BELAWA	SMAN 5 WAJID
293	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PITUMPANUA	SMAN 6 WAJID
294	UPT. Wil. Wajo	SMAN 3 SENGKANG	SMAN 7 WAJID
295	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PENRANG	SMAN 8 WAJID
296	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PAMMANA	SMAN 9 WAJID
297	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SABBANGPARU	SMAN 10 WAJID
298	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 TAKALALLA	SMAN 11 WAJID
299	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 KEERA	SMAN 12 WAJID
300	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 BOLA	SMAN 13 WAJID
301	UPT. Wil. Wajo	SMAN 2 PITUMPANUA	SMAN 14 WAJID
302	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SAJOANGING	SMAN 15 WAJID
303	UPT. Wil. Makassar	SMAN 1 MAKASSAR	SMAN 1 MAKASSAR
304	UPT. Wil. Makassar	SMAN 2 MAKASSAR	SMAN 2 MAKASSAR
305	UPT. Wil. Makassar	SMAN 3 MAKASSAR	SMAN 3 MAKASSAR
306	UPT. Wil. Makassar	SMAN 4 MAKASSAR	SMAN 4 MAKASSAR
307	UPT. Wil. Makassar	SMAN 5 MAKASSAR	SMAN 5 MAKASSAR
308	UPT. Wil. Makassar	SMAN 6 MAKASSAR	SMAN 6 MAKASSAR
309	UPT. Wil. Makassar	SMAN 7 MAKASSAR	SMAN 7 MAKASSAR
310	UPT. Wil. Makassar	SMAN 8 MAKASSAR	SMAN 8 MAKASSAR
311	UPT. Wil. Makassar	SMAN 9 MAKASSAR	SMAN 9 MAKASSAR
312	UPT. Wil. Makassar	SMAN 10 MAKASSAR	SMAN 10 MAKASSAR
313	UPT. Wil. Makassar	SMAN 11 MAKASSAR	SMAN 11 MAKASSAR
314	UPT. Wil. Makassar	SMAN 12 MAKASSAR	SMAN 12 MAKASSAR
315	UPT. Wil. Makassar	SMAN 13 MAKASSAR	SMAN 13 MAKASSAR
316	UPT. Wil. Makassar	SMAN 14 MAKASSAR	SMAN 14 MAKASSAR
317	UPT. Wil. Makassar	SMAN 15 MAKASSAR	SMAN 15 MAKASSAR
318	UPT. Wil. Makassar	SMAN 16 MAKASSAR	SMAN 16 MAKASSAR
319	UPT. Wil. Makassar	SMAN 17 MAKASSAR	SMAN 17 MAKASSAR
320	UPT. Wil. Makassar	SMAN 18 MAKASSAR	SMAN 18 MAKASSAR
321	UPT. Wil. Makassar	SMAN 19 MAKASSAR	SMAN 19 MAKASSAR
322	UPT. Wil. Makassar	SMAN 20 MAKASSAR	SMAN 20 MAKASSAR
323	UPT. Wil. Makassar	SMAN 21 MAKASSAR	SMAN 21 MAKASSAR
324	UPT. Wil. Makassar	SMAN 22 MAKASSAR	SMAN 22 MAKASSAR
325	UPT. Wil. Makassar	SMAN 23 MAKASSAR	SMAN 23 MAKASSAR
326	UPT. Wil. Palopo	SMAN 1 PALOPO	SMAN 1 PALOPO
327	UPT. Wil. Palopo	SMAN 2 PALOPO	SMAN 2 PALOPO
328	UPT. Wil. Palopo	SMAN 3 PALOPO	SMAN 3 PALOPO
329	UPT. Wil. Palopo	SMAN 4 PALOPO	SMAN 4 PALOPO
330	UPT. Wil. Palopo	SMAN 5 PALOPO	SMAN 5 PALOPO
331	UPT. Wil. Palopo	SMAN 6 PALOPO	SMAN 6 PALOPO
332	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 1 PAREPARE	SMA NEGERI 1 PAREPARE
333	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 2 PAREPARE	SMA NEGERI 2 PAREPARE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE



GUVERNOR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., M.H.